

Laporan Penelitian



**PERBEDAAN HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI
DI UIN AR-RANIRY**

Ketua Peneliti:
Samsul Bahri, M.Ag.
NIP. 197005061996031003

Pembantu Peneliti:
Dr. Jasafat, MA.
Dr. Safrul Muluk, MA.

Sumber Dana:
DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2015

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II: KERANGKA TEORI	7
A. Pendahuluan	7
B. Kerangka Teori	8
BAB III: METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
C. Kategori dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	39
B. Perolehan Nilai Hasil Akreditasi Program Studi ..	61
BAB V: PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal penting yang mesti diperhatikan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini adalah tentang akreditasi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 1, yang dimaksud dengan akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Sementara itu, pada ayat 2, disebutkan bahwa akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.

Program Studi yang dimaksudkan di sini dijelaskan dalam ayat 9, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Tujuan akreditasi prodi sebagaimana dijelaskan pada pasal 2, ada dua. *Pertama*, untuk menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan *kedua*, untuk menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal yaitu suatu proses yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ciri akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pakar sejawat dari luar institusi terkait (*external peer reviewer*), dan dilakukan secara voluntir bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan suatu program studi.. Kegiatan ini diawali dengan melakukan kegiatan evaluasi diri (*self evaluation*) terhadap berbagai/ komponen dari masukan, proses dan produk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi tersebut dan mengirimkan laporannya ke lembaga asesor.

Selanjutnya berdasarkan laporan evaluasi tersebut pihak lembaga asesor mengirim beberapa pertanyaan (*borang*) untuk diisi dan berdasarkan isian tersebut dilakukan kunjungan lapangan (*site visit*) oleh asesor sebagai tindakan validasi. Dengan kata lain Akreditasi sama dengan status dan proses. Status disini dalam konteks perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studiterakreditasi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sedangkan Proses dalam konteks ini maksudnya adalah proses kegiatan akademik telah dilakukan memenuhi standar mutu dan kecenderungan melakukan perbaikan secara berkesinambungan melalui evaluasi diri.

Setidaknya terdapat tiga faktor yang mendesak mengenai pelaksanaan akreditasi. *Pertama*, memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu. *Kedua*, mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. *Ketiga*, hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry sejauh ini telah memiliki sebanyak 45 program studi yang tersebar pada 9 fakultas. Sebagian di antaranya telah dilakukan akreditasi, yaitu sebanyak 29 program studi. Sisanya, sebanyak 16 program studi masih berusmjkia satu tahun lebih dan saat ini sedang dalam proses akreditasi. Dari 29 program studi yang sudah menjalani proses akreditasi itu, hasilnya dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan. Sebagian besar di antaranya mendapat nilai B, yaitu

19 program studi, sisanya sebanyak 6 program studi mendapatkan nilai A, dan 4 program studi mendapatkan nilai C.

Perolehan nilai akreditasi yang bervariasi di antara program-program studi yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry menimbulkan pertanyaan. Bagaimana perbedaan hasil penilaian tersebut bisa terjadi sementara program-program studi itu berada di bawah naungan universitas yang sama. Penelitian ini dipandang lebih mendesak sehubungan dengan adanya fakta bahwa semua program studi di universitas ini memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas yang relatif sama. Tidak hanya itu, sebagian pengelola program studi juga memiliki persepsi bahwa seharusnya tidak terjadi perbedaan hasil penilaian yang sangat mencolok antara satu program studi dengan program studi lainnya. Permasalahan-permasalahan ini sama sekali tidak ditujukan untuk mempersoalkan profesionalitas pihak yang melakukan akreditasi, yang dalam hal ini adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hal yang lebih tepat untuk diteliti dalam kaitan ini adalah menemukan sejumlah faktor yang dipandang mempunyai relevansi terhadap hasil penilaian akreditasi masing-masing program studi.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah, di satu sisi semua program studi yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang relatif sama, namun di sisi lain ternyata hasil penilaian akreditasi yang

diperoleh masing-masing prodi berbeda-beda. Sebagian prodi mendapatkan nilai A, sebagian lagi mendapatkan nilai B, dan bahkan ada yang mendapatkan nilai C. Permasalahan pokok ini dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Mengapa perolehan nilai hasil akreditasi program studi di UIN Ar-Raniry bervariasi?
2. Bagaimana dukungan stakeholder terhadap pengelolaan program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry sehingga berdampak pada perbedaan hasil penilaian akreditasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan alasan yang komprehensif dan proporsional sehubungan dengan perbedaan hasil penilaian akreditasi program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry.
2. Mendapatkan informasi yang lengkap tentang dukungan stakeholder terhadap pengelolaan program studi di UIN Ar-Raniry yang berdampak pada perbedaan hasil penilaian akreditasi masing-masing program studi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi akademis dan praktis bagi pengelolaan program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry. Dari sisi akademis, diharapkan ada pemahaman yang komprehensif di kalangan para pengelola program studi tentang

segala hal yang terkait dengan posisi dan fungsi akreditasi bagi sebuah program studi. Sementara itu, dari sisi praktis, diharapkan para pengelola program studi diharapkan bisa mendapatkan banyak masukan yang berhubungan dengan strategi, kiat dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualifikasi program studi yang dikelolanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Pendahuluan

Penelitian tentang akreditasi program studi sejauh ini belum banyak dilakukan. Secara umum, penelitian dimaksud selama ini lebih banyak berkenaan dengan manfaat dan efektivitas akreditasi. Salah satu penelitian yang seperti ini dilakukan oleh Chibanu Aslam dengan judul: *Pengembangan Model Akreditasi Program Studi*. Penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada bagaimana mendapatkan model akreditasi prodi dapat dipergunakan untuk mencari bobot semua standar secara keseluruhan. Selain itu, terdapat juga penelitian Ahmad kholiq yang berjudul: *Standar Akreditasi Prodi* yang mengarahkan penelitian pada perumusan standar yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kriteria *goodness of fit indices*. Dalam penelitian tersebut termuat tata cara pembuatan instrumen standar-standar untuk pelaksanaan akreditasi prodi dan pembuatan persamaan struktural model akreditasi prodi untuk standar-standar akreditasi prodi. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh sebuah tim Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berjudul: *Kajian Analisis Sistem Akreditasi Program Studi*. Penelitian ini agaknya dimaksudkan untuk mendapatkan model akreditasi perguruan tinggi yang mencakup hubungan standar: dimensi strategik (visi, misi, tujuan, sasaran,

dan strategi pencapaian), dimensi akademik (kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik), dimensi tangible asset (pembiayaan, sarana prasarana, dan sistem informasi), dimensi pengelolaan penelitian (penelitian, PPM, dan kerjasama), dimensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan), dimensi kemahasiswaan (mahasiswa dan lulusan), dan dimensi pengelolaan prodi (tata kelola, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu) terhadap kinerja program studi dalam permodelan path analysis.

B. Kerangka Teori

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan satu-satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan Nasional). Tugas utama badan ini adalah:

- (1) meningkatkan mutu pendidikan tinggi,

- (2) memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan
- (3) meningkatkan relevansi, atmosfir akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi. (Tadjudin, 2000).

BAN-PT berdiri pada tahun 1994, berlandaskan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai satu satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada pendidikan tinggi. Dalam wewenang ini termasuk juga melaksanakan akreditasi bagi semua institusi pendidikan tinggi (baik untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK)); program-program pendidikan jarak jauh; dan program-program, secara kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di dalam negeri, yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi dari luar negeri (saat ini institusi pendidikan tinggi dari luar negeri tidak dapat beroperasi, secara legal, di Indonesia). Dalam PP No. 60 tahun Kajian Analisis Sistem Akreditasi Program Studi 14 1989. PP 60 disebutkan bahwa BAN-PT merupakan badan yang mandiri (independen) yang diangkat dan melaporkan tugasnya pada Menteri Pendidikan Nasional.

Fungsi utama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menurut peraturan perundangan yang ada

(UURI No. 20 tahun 2003, PPRI No. 60/1999, SK Menteri Pendidikan Nasional No. 118/U/2003), pada dasarnya adalah: membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam pelaksanaan salah satu kewajiban perundangannya, yaitu penilaian mutu perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri, Kedinasan, Keagamaan, dan Swasta.

Akreditasi menurut pemerintah : kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.¹ Sedangkan akreditasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2003 Pasal 60 ayat (1) dan (3), akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut sebagaimana Pasal 35 ayat (1), standar pendidikan nasional terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Adapun yang menjadi alasan kebijakan akreditasi di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi standar yang

¹Peraturan Pemerintah No.19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hlm. 3.

dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Jadi akreditasi pada satuan pendidikan adalah penilaian yang diberikan pemerintah atas kelayakannya sebagai satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria yang dikeluarkan sistem pendidikan nasional yang mana pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia oleh manusia yang telah memanusiakan. Adapun dasar hukum dilakukannya akreditasi pada suatu sekolah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 dan 87. Dengan tujuan akreditasi menentukan tingkat kelayakan suatu lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah.

Semenjak diberlakukannya akreditasi program studi pada tahun 1997, kini banyak masyarakat yang memfungsikan peringkat akreditasi sebagai tolok ukur kualitas program studi. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa program studi yang mendapatkan peringkat 'A' atau 'B' dianggap sebagai program studi yang berkualitas; adapun, yang berperingkat akreditasi 'C' dianggap kurang berkualitas. Oleh karena itu, banyak program studi yang mendapatkan peringkat 'C' tidak terlalu gembira sekalipun sudah berkualifikasi 'terakreditasi'. Sebenarnya, dengan berperingkat 'C' program studi tersebut sudah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; yang di antaranya mempunyai otoritas legal untuk menerbitkan sertifikat

pendidik atau ijasah bagi lulusannya (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 43, ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2)).

Untuk itu, hampir semua perguruan tinggi di Indonesia berupaya setinggi-tingginya untuk memperoleh peringkat nilai akreditasi sekurang-kurangnya 'B'. Namun, hasilnya ternyata kurang memuaskan; dari 10.587 program studi yang telah diproses akreditasinya oleh BAN-PT sebanyak 36,10% mendapat nilai peringkat 'C'; sekalipun di PTN kondisinya relatif lebih baik yakni hanya 15,71% yang mendapat peringkat 'C'.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program atau satuan pendidikan, begitu juga dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional, dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAN-PT bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/

madrasah, BAN-PT, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Begitu juga dengan BAN-PT sesuai dengan UU no 22/1961/UUSPN No 2/1989 dan diperjelas dalam UU-Sisdiknas No 20/2003.

Tujuan yang ingin dicapai dari reformasi layanan akreditasi perguruan tinggi ialah memberikan kemudahan kepada pemangku kepentingan dalam mendapatkan layanan akreditasi. Untuk mencapai layanan perlu upaya untuk mengevaluasi dan menganalisis proses awal sistem akreditasi Perguruan Tinggi (PT). Semua capaian dapat diwujudkan dalam analisis sistem akreditasi PT. Jadi dalam penelitian ini akan dibahas tentang akreditasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan khususnya prodi-prodi yang berizin.

Civitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry nampaknya harus berbangga dan tetap percaya diri, sebab berdasarkan hasil visitasi oleh tim assesor BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) menunjukkan bahwa semua jurusan/prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry mendapatkan akreditasi yang membanggakan, meskipun masih ada prodi yang mendapatkan nilai “C” seperti prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Bagi civitas akademika di lingkungan UIN Ar-Raniry mempertanyakan mengapa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK) masih ada prodi yang mendapat nilai akreditasi “C” sedangkan secara profesional FTIK memiliki kompetensi untuk mencapai nilai akreditasi membanggakan.

Atas dasar tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk melihat lebih jauh bagaimana langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan UIN Ar-Raniry dalam akreditasi Fakultas/prodi yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan pada tahun 2014.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, persiapan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan adalah Dekan dan Wakil Dekan Bidang akademik yang bertanggungjawab terhadap proses belajar mengajar di fakultas melaksanakan visitasi. Visitasi dilaksanakan untuk melengkapi dan meningkatkan kecermatan, keabsahan serta kesesuaian data dan informasi mengenai keadaan dan kinerja serta penilaian lapangan di program studi yang diakreditasi.

Dengan demikian, fokus visitasi ini adalah untuk verifikasi dan validasi data yang telah dimasukkan dalam Borang, serta mempunyai tujuan yang lebih substansial, yaitu melakukan penilaian langsung secara kualitatif berdasarkan penilaian pakar (*expert judgement*) oleh Tim Asesor yang ditentukan oleh BAN-PT untuk mendampingi tim vesitasi akreditasi BAN-PT.

Terkait dengan TUPOKSI dari setiap unsur yang terkait dalam proses akreditasi di FTIK UIN Ar-Raniry semestinya melibatkan para pihak yang mengharapkan agar hasil akreditasi pada pringkat prodi seperti:

1. Fakultas: Acuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan fakultas/prodi, bahan masukan untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga fakultas/prodi, pendorong motivasi peningkatan kualitas fakultas/prodi secara gradual, selain sebagai fakultas/prodi yang berkualitas, fakultas/prodi yang terakreditasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga dan profesionalisme.
2. Pimpinan fakultas/prodi: Bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja warga fakultas/prodi termasuk kinerja kepala fakultas/prodi selama satu periode (4 tahun), bahan masukan untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja fakultas/prodi.
3. Dosen: Dorongan bagi dosen untuk selalu meningkatkan diri dari bekerja keras untuk memberi layanan yang terbaik bagi mahasiswanya.
4. Masyarakat: Informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap fakultas/prodi, bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap dirinya bahwa ia mampu masuk dan berfakultas/prodi di lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional.

5. Rektor: Acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing, bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum, dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional Badan Akreditasi Fakultas/prodi di tingkat Dinas.
6. Pemerintah: Bahan masukan untuk pengembangan sistem akreditasi fakultas/prodi di masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang bersifat nasional, sumber informasi tentang tingkat kualitas layanan pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja pendidikan secara makro, bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum di tingkat nasional, dan khususnya program dan penganggaran pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan nasional.²

Proses akreditasi program studi dimulai dengan pelaksanaan evaluasi diri di program studi yang bersangkutan. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan BAN-PT, namun, jika dianggap perlu, pihak

² Bambang Suryadi, Pedoman Akreditasi ..., hlm. 6

pengelola program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan program studi maupun institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuat sebuah rangkuman eksekutif (executive summary), yang selanjutnya rangkuman eksekutif tersebut dilampirkan dalam surat permohonan untuk diakreditasi yang dikirimkan ke sekretariat BAN-PT.

Sekretariat BAN-PT akan mengkaji ringkasan eksekutif dari program studi tersebut, dan jika telah memenuhi semua komponen yang diminta dalam pedoman evaluasi diri sekretariat BAN-PT akan mengirimkan instrumen akreditasi yang sesuai dengan tingkat program studi setelah instrumen akreditasi diisi, program studi mengirimkan seluruh berkas (instrumen akreditasi yang telah diisi dan lampirannya, beserta copy-nya) ke sekretariat BAN-PT. Jumlah copy yang harus disertakan untuk program studi tingkat Diploma dan Sarjana sebanyak 3 copy, sedangkan untuk program studi tingkat Magister dan Doktor sebanyak 4 copy. Penilaian dilakukan setelah seluruh berkas diterima secara lengkap oleh sekretariat BAN-PT.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi program studi antara lain meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Akreditasi
2. Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data
3. Majelis BAN-PT
4. Asesor
5. Program Studi yang bersangkutan

Dalam melakukan akreditasi program studi, kebutuhan akan data atau dokumen penunjang sangat mutlak diperlukan. Tanpa adanya data atau dokumen penunjang BAN PT tidak dapat menilai dan memberikan akreditasi terhadap suatu program studi di perguruan tinggi. Data atau dokumen penunjang dikembangkan berdasarkan standar dan parameter penilaian yang dikembangkan oleh badan akreditasi. Data atau dokumen penunjang berisi kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana secara berkelanjutan.

A. Standar Penilaian Akreditasi Program Studi

1. Standar 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian

Penilaian akreditasi program studi meliputi tujuh standar. Standar pertama adalah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian. Untuk pengisian borang akreditasi standar pertama ini diisi dengan menjawab pertanyaan diajukan sebagai berikut. *Pertama*, diminta untuk menjelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta pihak-pihak yang dilibatkan. *Kedua*, setiap program studi diminta untuk mengisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya secara lengkap pada kolom yang sudah disediakan. *Ketiga*, sebagai pertanyaan terakhir pada standar

pertama adalah berupa perintah untuk menguraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

2. Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar 2 berkenaan dengan Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu. Pengisian borang akreditasi pada standar 2 terdiri atas 6 (enam) hal. *Pertama*, Sistem Tata Pamong. Untuk bagian ini terdapat penjelasan mengenai pengisiannya. Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Oleh karena itu di dalam pengisian borang diminta untuk

menguraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Program Studi untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

Kedua, berkenaan dengan Kepemimpinan. Menurut petunjuk pengisian borang, kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Pada bagian ini terdapat perintah yang harus dilakukan yaitu menjelaskan pola kepemimpinan dalam Program Studi.

Ketiga, berkenaan dengan Sistem Pengelolaan. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling* dalam kegiatan internal maupun eksternal. Hal yang mesti diisi dalam borang adalah penjelasan tentang sistem pengelolaan Program Studi serta dokumen pendukungnya.

Keempat, tentang Penjaminan Mutu. Pada bagian ini diminta untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan penjaminan mutu pada Program Studi dilaksanakan.

Kelima, terkait dengan Umpan Balik. Pertanyaannya adalah, Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya.

Keenam, berkenaan dengan Keberlanjutan. Di sini pengelola prodi diminta untuk menjelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi, khususnya dalam lima hal: Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa; Upaya peningkatan mutu manajemen; Upaya untuk peningkatan mutu lulusan; Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan; Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif.

3. Standar 3: Kemahasiswaan dan Lulusan

Standar 3 berkenaan dengan kemahasiswaan dan lulusan. Hal *pertama* yang mesti diisi pada standar 3 adalah profil mahasiswa dan lulusan. Pengisian mengikuti format tabel yang sudah disediakan. Terdapat 8 (delapan) kolom yang harus diisi untuk 5 (lima) angkatan mahasiswa dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kolom pertama tentang tahun akademik, kolom kedua mengenai daya tampung mahasiswa di program studi tersebut. Selanjutnya pada kolom ketiga dan keempat diisi jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi dan jumlah yang lulus seleksi. Akan halnya kolom 5 dan 6 berisi jumlah mahasiswa baru, baik

yang reguler maupun transfer. Jumlah total mahasiswa diisi pada kolom 7 dan 8. Untuk kolom 7 diisi jumlah total mahasiswa reguler, sedangkan kolom 8 adalah jumlah mahasiswa transfer. Jumlah lulusan diisi pada kolom 9 untuk lulusan reguler dan kolom 10 untuk jumlah lulusan transfer. Kolom tentang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) para lulusan reguler adalah kolom 11 untuk IPK minimal, kolom 12 untuk IPK rata-rata dan kolom 13 untuk IPK maksimal. Terakhir, mengenai presentase lulusan reguler dengan IPK yang terdiri atas tiga kategori; di bawah 2,75 disajikan pada kolom 14, IPK 2,75 sampai 3,50 diletakkan pada kolom 15, dan IPK di atas 3,50 diisi pada kolom 16.

Hal lain yang mesti diisi pada standar 3 adalah data mahasiswa non reguler dalam 5 (lima) tahun terakhir. Untuk pengisian hal ini juga tersedia tabel yang terdiri atas 8 kolom. Kolom pertama adalah tahun akademik, dilanjutkan kolom 2 mengenai daya tampung. Seterusnya adalah jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi pada kolom 3, dan jumlah mahasiswa yang lulus seleksi pada kolom 4. Kolom 5 diisi jumlah mahasiswa baru non reguler dan kolom 6 jumlah mahasiswa baru transfer. Terakhir mengenai jumlah total mahasiswa non reguler diisi pada kolom 7 dan jumlah total mahasiswa transfer pada kolom 8.

Pada standar 3 juga terdapat pertanyaan tentang prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, olahraga, dan seni). Untuk

pengisiannya juga tersedia tabel yang terdiri atas 4 (empat) kolom. Pertama, nomor. Kolom kedua, nama kegiatan dan waktu penyelenggaraan. Kolom 3 tentang tingkat (lokal, regional, nasional dan internasional). Terakhir adalah kolom 4 tentang prestasi yang dicapai.

Data yang tampaknya juga dianggap penting adalah mengenai jumlah mahasiswa reguler pada program studi tersebut selama tujuh tahun terakhir. Masing-masing angkatan ditulis secara tersendiri dan mengikuti format tabel.

Data tentang layanan terhadap mahasiswa diisi juga pada standar 3. Layanan dimaksud meliputi; Bimbingan dan konseling, Minat dan bakat (ekstra kurikuler), Pembinaan *soft skills*, Beasiswa, Kesehatan, dan lainnya jika ada diminta untuk disebutkan. Semua layanan ini diminta untuk menguraikan Bentuk kegiatan, Pelaksanaan dan Hasilnya.

Standar 3 juga berisikan penjelasan mengenai Evaluasi Kinerja lulusan oleh Pihak Pengguna Lulusan. Di sini ditanyakan tentang studi pelacakan (*tracer study*) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna. Jika ada dilakukan, diminta untuk menguraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut. Selanjutnya, diminta pula penjelasan tentang bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini. Ada tujuh item yang diminta untuk dievaluasi, yaitu Integritas (etika dan moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama tim,

dan Pengembangan diri. Masih berkenaan dengan evaluasi lulusan, juga diminta data mengenai rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama, serta persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya. Kedua data ini harus dijelaskan metode atau perolehannya.

Hal terakhir yang termuat pada isian borang standar 3 adalah mengenai Himpunan Alumni. Terkait hal ini diminta penjelasan, apakah lulusan program studi memiliki himpunan alumni. Jika memiliki, diminta untuk menjelaskan aktivitas dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan program studi.

4. Standar 4: Sumber Daya Manusia

Pada standar 4, terdapat sejumlah hal yang harus diisi. *Pertama*, sistem seleksi dan pengembangan. Pada bagian ini ditanyakan tentang sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Setelah itu, ditanyakan mengenai monitoring dan evaluasi. Di sini diminta penjelasan tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan. Hal lain yang juga sangat penting adalah mengenai pemilahan dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap yang dimaksudkan pada pengisian borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai

tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu. Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: *pertama*, dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi; dan *kedua*, dosen tetap yang bidang keahliannya di luar program studi.

Terkait dengan pengisian data dosen tetap, tersedia tabel yang terdiri atas 8 kolom. Kolom-kolom dimaksud berisikan nomor urut, nama dosen, NIDN, tanggal lahir, jabatan akademik, gelar akademik, pendidikan dan bidang keahlian setiap jenjang pendidikan. Semua data yang diisi dalam tabel mengharuskan adanya lampiran berupa dokumen dan sejenisnya. Hal lain yang terkait dengan data dosen tetap adalah aktivitas di program studi dan di luar program studinya.

Pengisian borang standar 4 juga berkenaan dengan dosen tidak tetap. Hal yang diminta untuk diisi adalah mengenai data pendidikan yang mencakup 8 kolom sebagaimana pada dosen tetap; nomor urut, nama dosen, NIDN, tanggal lahir, jabatan akademik, gelar akademik, pendidikan dan bidang keahlian setiap jenjang pendidikan.

Data lainnya yang harus diisi pada standar 4 adalah Aktivitas dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dinyatakan dalam sks rata-rata per

semester pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen DIKTI no. 48 tahun 1983 (12 sks setara dengan 36 jam kerja per minggu). Untuk pengisiannya tersedia tabel yang terdiri atas 10 kolom; nomor urut, nama dosen, SKS pengajaran pada program studi sendiri, SKS pengajaran pada program studi lain di perguruan tinggi sendiri, SKS pengajaran pada perguruan tinggi lain. Selanjutnya ada kolom SKS penelitian, SKS Pengabdian kepada masyarakat, SKS manajemen pada perguruan tinggi sendiri dan pada perguruan tinggi lainnya, serta kolom jumlah SKS keseluruhannya.

Untuk keperluan panduan pengisian tersedia catatan bahwa sks pengajaran sama dengan sks mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban sks pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali sks mata kuliah.

Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.

- rektor 12 sks
- pembantu rektor / dekan 10 sks
- ketua sekolah tinggi / pembantu dekan 8 sks
- ketua jurusan / ketua program studi 6 sks

- sekretaris jurusan/ sekretaris program studi 6 sks
- ketua laboratorium universitas/institut/sekolah tinggi 6 sks
- ketua laboratorium jurusan/program studi 3 sks

Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

Pengisian standar 4 juga berkenaan dengan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dalam satu tahun akademik terakhir di program studi yang bersangkutan. Tabel untuk pengisian aktivitas terdiri atas 8 kolom; nomor urut, nama dosen, bidang keahlian, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah kelas, jumlah pertemuan yang direncanakan, dan jumlah pertemuan yang dilaksanakan. Tabel yang sama juga diberlakukan terhadap dosen tetap yang keahliannya di luar program studi.

Isian standar 4 mencakup banyak sisi yang ada hubungannya dengan dosen. Termasuk mengenai keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah, internasional, regional dan lokal. Begitu pula halnya dengan prestasi, ketergabungannya dalam profesi keilmuan dan sebagainya.

5. Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam

kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Hal yang beriringan dengan kurikulum adalah kompetensi utama lulusan. Untuk pengisian borang, diminta untuk menguraikan secara ringkas kompetensi utama lulusan, kompetensi pendukung dan kompetensi pilihan lulusan program studi tersebut.

Terkait dengan kurikulum, perlu juga dikemukakan Pelaksanaan Proses pembelajaran. Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik

kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar. Hal yang juga tidak bisa diabaikan adalah Mekanisme Monitoring Perkuliahan. Di sini diminta untuk menjelaskan mekanisme untuk memonitor perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi perkuliahan.

Selain sistem perkuliahan, juga ada isian tentang sistem pembimbingan akademik. Dalam pembimbingan akademik, diminta untuk menuliskan nama dosen pembimbing akademik dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya. Setelah itu juga ada perintah untuk menjelaskan proses pembimbingan akademik, mulai dari Tujuan pembimbingan, Pelaksanaan pembimbingan, Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan, Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya, Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan.

Selanjutnya ada bagian tentang Pembimbingan Tugas Akhir / Skripsi. Di sini diminta untuk menjelaskan pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi yang diterapkan pada program studi yang bersangkutan. Penekannyanya di sini adalah Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, dan Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir; mulai dari saat mengambil tugas akhir sampai dengan menyelesaikannya. Selanjutnya, diminta untuk menuliskan nama-nama dosen yang menjadi pembimbing tugas akhir atau skripsi, dan jumlah mahasiswa yang bimbingan.

6. Standar 6: Pembiayaan, Prasarana, Sarana dan Sistem Informasi

Kinerja pada standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi diukur dari beberapa indikator seperti pengelolaan (perencanaan, penggunaan dan evaluasi) dana termasuk dana hibah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Sarana prasarana yang memenuhi standar diukur dari luas ruang kerja dosen, prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PROGRAM STUDI dalam proses pembelajaran dan prasarana pendukung lainnya.

Standar perpustakaan diukur dari jumlah buku teks, disertasi/tesis/skripsi program studi/tugas akhir, jurnal ilmiah terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah internasional, prosiding seminar, akses ke perpustakaan di luar PT dan fasilitas sistem informasi yang mendukung akses ke sumber pustaka lainnya. Menurut persepsi responden, standar pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi merupakan standar yang paling sulit dicapai oleh program studi. Hanya program studi yang sering mendapat hibah saja yang mampu mengembangkan prodi dengan fasilitas yang memadai.

7. Standar 7: Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat

Kinerja program studi dari unsur penelitian dan pengabdian masyarakat diukur dari kuantitas dan kualitas

penelitian, artikel ilmiah, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut, selama tiga tahun terakhir.

Standar kerjasama dinilai dari kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam/luar negeri dalam tiga tahun terakhir. Dosen yang produktif, banyak menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sangat mendukung program studi meraih nilai tinggi pada standar ini. Standar ini menjadi sulit dicapai jika beban kerja dosen berlebihan sehingga dosen tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan mengajar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya tergolong jenis *field research* yang mengutamakan penggunaan data lapangan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagaimana akan dijelaskan. Meskipun demikian, data kepustakaan dalam batas-batas tertentu juga akan digunakan sebagai data pelengkap. Menurut Singleton dan Straits, tujuan studi lapangan adalah untuk memahami kondisi masyarakat yang dijadikan obyek penelitian yang berkaitan dengan pemikiran, perilaku, pemahaman, persepsi dan budaya suatu masyarakat tertentu.³ Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang menekankan tujuannya pada pendeskripsian sisi-sisi tertentu dari obyek penelitian. Yang menjadi obyek penelitian dalam kaitan ini adalah kegiatan pengelolaan program studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengarahkan kepada penyelidikan yang bertujuan memahami peran kelompok atau interaksi pada situasi sosial tertentu. Pendekatan kualitatif juga dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

³Singleton dan Straits, *Approaches to Social Research*, OUP: New York, 1999, h. 71.

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴ Pendekatan kualitatif lebih menekankan pemahaman "hakekat" realitas yang terbentuk secara akumulatif gradual, terutama dengan berusaha menjawab pertanyaan: *bagaimana fakta dan pengalaman sosial terbentuk dan diberi makna*. Hal ini terutama didasari oleh asumsi bahwa manusia merupakan *animal symbolicum* (makhluk simbolis) yang selalu terdorong untuk memahami makna pada setiap symbol yang ditemui.

B. Kategori dan Sumber Data

Data untuk penelitian ini terdiri atas tiga kategori berdasarkan sumber perolehannya. *Pertama*, data primer atau data utama yang diperoleh dari responden melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer adalah para responden dari berbagai kategorinya yang meliputi pengelola kegiatan program studi, peserta program studi, dosen dan representasi mahasiswa. Pengumpulan data terhadap sumber-sumber data dimaksud dilakukan dengan teknik yang beragam sebagaimana akan dijelaskan.

Kedua, data sekunder atau data pendukung yang bersumberkan bahan bacaan dan dokumentasi yang ada. Secara keseluruhan data sekunder meliputi buku panduan program studi yang digunakan pengelola, karya para ahli tentang pengelolaan program studi, serta surat-surat yang terkait dengan

⁴Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 2-6.

aktivitas penyelenggaraan program studi. Perolehan data pendukung dapat dilakukan dengan melakukan telaah kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap segala karya tertulis mengenai pengelolaan program studi. Data jenis ini diperlukan dalam upaya memudahkan interpretasi data primer, di samping sebagai pengayaan teori.

Ketiga, data tersier yang diperoleh dari sumber-sumber pelengkap seperti bahan tulisan yang bukan ditujukan untuk membahas masalah terkait sebagai bahasan utama. Sumber-sumber data tersier yang lazim digunakan adalah majalah, koran, ensiklopedi dan kamus.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan keadaan responden. Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dan dipandang penting adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berbentuk pengamatan langsung. Ada dua model observasi yang dilakukan. Pertama, peneliti melibatkan diri dalam kegiatan program studi secara berulang-ulang hingga diperkirakan sudah mengetahui secara akurat keadaan obyek yang diamati. Observasi model ini dikenal dengan observasi partisipan. Model observasi kedua adalah peneliti mengamati perilaku

penyelenggara program studi selama penyelenggaraan program studi berlangsung. Peneliti sendiri tidak ikut dalam proses penyelenggaraan kegiatan program studi agar pengamatan yang dilakukan bisa lebih intensif. Kedua model pengamatan ini digunakan untuk penelitian ini. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi ditujukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai tentang rangkaian keseluruhan aktivitas pengelolaan program studi. Rangkaian dimaksud meliputi persiapan pelaksanaannya, selama kegiatan dilaksanakan bahkan sampai dengan proses penyelenggaraan program studi berakhir. Ada tiga kelompok penyelenggaraan program studi yang diobservasi; program studi yang mendapatkan hasil akreditasi A, program studi yang mendapatkan hasil akreditasi B, dan program studi yang mendapatkan hasil akreditasi C.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab untuk menggali alam pikiran dan wawasan informan tentang pelaksanaan penyelenggaraan program studi. Wawancara yang dilakukan non struktur, sehingga memungkinkan informan yang diwawancarai sebagai subjek yang aktif mengkonstruksikan dunia kognitifnya, sedangkan peneliti berusaha menangkap alam makna tersebut. Oleh karena itu subjek yang bukan hanya diharapkan menjawab secara jujur, melainkan secara kreatif menjabarkan secara luas dan dalam. Namun demikian untuk

mengarah pada fokus tema penelitian, dipandu dengan pedoman wawancara yang disusun peneliti secara fleksibel.

Adapun prodi-prodi yang menjadi subyek penelitian adalah prodi-prodi yang mendapatkan hasil akreditasi A, B, dan C di fakultas dalam lingkungan UIN Ar-Raniry. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti akan mewawancarai unsur pimpinan Fakultas sebanyak 2 (dua) orang, pimpinan program studi yang berakreditasi A, B, dan C masing-masing sebanyak 2 (dua) orang, serta representasi dosen dan mahasiswa yang jumlahnya masing-masing 2 orang.

Pimpinan fakultas yang diwawancarai adalah Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik (Wadek I) dan Kepala Tata Usaha (KTU). Akan halnya unsur pimpinan program studi yang diwawancarai adalah ketua program studi atau sekretaris program studi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Prosedur yang dilalui dalam analisis data penelitian ini, dimulai dari display dan editing data, kategorisasi data berdasarkan fokus kajian, dan penafsiran maksud berbagai fakta dan pengakuan responden. Editing data bertujuan untuk memilih dan memilah. Hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang diproses lebih lanjut. Kategorisasi data maksudnya adalah pengelompokan data yang berbeda-beda dari informan. Penafsiran data merupakan ikhtiar untuk menjelaskan makna-

makna data dan mengapa terjadi demikian, serta bagaimana seharusnya dilakukan. Data yang sudah dianalisis dan ditemukan makna dari data tersebut disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Oleh karena penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, analisis data lebih mengandalkan kekuatan penafsiran makna tentang pelaksanaan penyelenggaraan program studi berdasarkan persepsi yang beragam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Ar-Raniry merupakan nama seorang Ulama besar dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (memerintah tahun 1637-1641). Ulama besar tersebut nama lengkapnya Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di Gujarat, India. Beliau telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh. Mungkin dengan mempertimbangkan peran dan kedudukannya tersebut, sehingga Pendiri Perguruan Tinggi Islam menggunakan kebesaran peran ulama sebagai nama Insititut Agama Islam Negri (IAIN) di Aceh.

Awal Lahirnya IAIN Ar-Raniry dengan berdirinya Fakultas Syari'ah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah tahun 1962 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta. Masih pada tahun 1962 didirikan pula Fakultas Ushuluddin sebagai Fakultas swasta di Banda Aceh. Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, fakultas Syariah, Tarbiyah dan Ushuluddin berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan. Pada tanggal 5 Oktober 1963 IAIN Ar-Raniry resmi berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 dan diresmikan oleh Menteri Agama K.H Saifuddin Zuhri.

IAIN Ar-Raniry menjadi IAIN ketiga di nusantara setelah IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awal diresmikan baru memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1968 tepatnya 5 tahun IAIN Ar-Raniry, diresmikan pula Fakultas Dakwah sekaligus menjadi fakultas pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun 1968 ini pula, IAIN Ar-Raniry ditunjuk sebagai induk dari dua fakultas agama berstatus negeri di Medan (cikal bakal IAIN Sumatera Utara) yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah yang berlangsung selama 5 tahun. Sementara pada tahun 1983 Fakultas Adab resmi menjadi salah satu dari 5 fakultas di lingkungan IAIN Ar-Raniry.

Pada tahun pertama kelahirannya, IAIN masih mengharapkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat Aceh, terutama dari sisi kebutuhan belajar mengajar. Diibaratkan anak baru lahir, semuanya harus diurus oleh orang tuanya. Dalam konteks masa itu, seluruh lapisan masyarakat Aceh harus mampu memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk keperluan pendidikan di IAIN. Seperti yang tertulis dalam laporan yang ditandatangani oleh kuasa Rektor I Drs. H. Ismail Muhammad Sjah.

Presiden Sukarno dalam sambutan dies natalis pertama IAIN Ar-Raniry menyampaikan bahwa di Aceh harus

melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang mampu meneruskan revolusi dan perjuangan bangsa serta setia kepada Pancasila sebagai haluan negara. IAIN harus menjadi tempat penggodok kader revolusi yang menjaga jiwa toleransi dan persatuan bangsa. Semua itu harus tertanam dalam jiwa pendidik, pengajar dan mahasiswanya.

Mengikuti perkembangannya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, IAIN telah menunjukkan peran dan signifikansinya yang strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Lulusannya mampu mengemban amanah diberbagai instansi pemerintah dan swasta, termasuk di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Alumni telah berkiprah di berbagai profesi, baik yang berkaitan dengan sosial keagamaan, maupun yang berhubungan dengan aspek publik lainnya. Lembaga ini telah melahirkan banyak pemimpin di daerah ini, baik pemimpin formal maupun informal.

Tepat pada 5 Oktober 2013 genap berumur 50 tahun, biasanya tahun ini disebut tahun emas. Bertepatan dengan tahun tersebut Perguruan Tinggi ini akan merubah wajah dan namanya dari Institut menjadi Universitas melalui PERPRES No. 64 Tahun 2013 yang dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry).

Perubahan status dari IAIN ke UIN, maka tugas dan fungsinya secara otomatis akan berubah, sehingga UIN dituntut untuk senantiasa meningkatkan reputasinya yang pernah diukir

oleh para pendahulu IAIN baik secara fisik maupun proses belajar mengajar yang mengacu kepada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Semua perguruan tinggi pasti menempatkan kualitas sebagai salah satu asas pembangunannya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah perguruan tinggi akan merasa tidak senang jika ada yang mengatakan bahwa dosen, mahasiswa, atau lulusannya tidak berkualitas. Hanya saja konsep kualitas yang divisikan oleh setiap perguruan tinggi berbeda-beda. Walaupun secara ilmiah kualitas memang didefinisikan dan dibuktikan melalui proses diakreditasi yang dilaksanakan oleh pemerintah (BAN-PT).

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab II, proses akreditasi ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pengelola fakultas sampai dengan masyarakat. Oleh karena itu proses akreditasi yang dilaksanakan semestinya memberi arti bagi fakultas untuk senantiasa memperhatikan aspek-aspek yang dapat mengangkat dan menjatuhkan harkat dan martabat prodi dimana mereka terlibat dalam proses belajar-mengajar di dalamnya, namun sejauh ini masih ramai stakeholder yang beranggapan bahwa proses akreditasi itu adalah tanggungjawab fakultas atau prodi.⁵

1. Persiapan Akreditasi Prodi.

⁵ Hasil Wawancara dengan Dekan Fakultas Tabiyah

Menurut buku petunjuk BAN-PT yang dijadikan pedoman bagi pengelola perguruan tinggi dijelaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib untuk diakreditasi, hal ini disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 yang menjelaskan tahapan akreditasi yang harus dipersiapkan baik secara administrasi maupun bukti-bukti terkait lainnya, seperti;

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88) Pasal 86 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

Berdasarkan maksud Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka FTIK melaksanakan lokakarya bagi seluruh dosen dan ketua prodi. Lokakarya yang tujuannya menjadi bahan pertimbangan dan masukan oleh pengelola fakultas terutama ketua jurusan dan program studi (prodi) untuk perbaikan borang penyusunan akreditasi universitas itu, dimanfaatkan peserta lokakarya yang kebanyakan dari pejabat inti prodi, untuk menyampaikan argumennya terkait realitas

yang ada di fakultas. Sementara selama ini yang terjadi adalah hanya pimpinan fakultas dan ketua jurusan yang mempersiapkan diri untuk divesitasi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, akreditasi di fakultas, pertama mempersiapkan seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas diberikan kepada setiap jurusan, dengan cara melaksanakan pengarahan yang dipimpin langsung oleh Wakil Dekan Bidang akademik didampingi oleh seorang asesor internal yang ditunjuk oleh fakultas.⁶

Akreditasi suatu program studi bukan hanya menjadi tanggung jawab program studi yang bersangkutan, tetapi juga menjadi tanggung jawab pengelola program studi tersebut (jurusan/fakultas/universitas). Hal itu karena (1) 15% akreditasi berkaitan dengan fakultas /universitas dan (2) sejumlah kebijakan hanya dapat dilakukan oleh fakultas/universitas, oleh karena itu setelah kami menerima informasi formal tentang akan datangnya tim assessor yang akan melaksanakan vesitasi di fakultas tarbiyah, maka kami menyampaikan hal tersebut kepada seluruh Ketua Jurusan-Jurusan yang ada dilingkungan Fakultas tarbyah dan melantik tim asesor internal yang akan mendampingi dan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan masalah yang akan di vesitasi.

Sementara program terkait dengan program khusus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk mencapai nilai

⁶ Hasil Wawancara dengan Dekan Fakultas Tabiyah

akreditasi, ada sejumlah entitas yang dapat “dipersiapkan”, seperti kebijakan tertulis, panduan dan SOP, silabus mata kuliah, RPP, notulen kegiatan, dan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, pelatihan, dan lain-lain (dengan mengundang pakar dari luar).

Di samping sebagai anggota *task force* persiapan akreditasi program studi, dosen berperan memasok sejumlah informasi yang diperlukan dalam borang. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan oleh dosen adalah mengumpulkan *curriculum vitae* yang lengkap sesuai dengan tuntutan borang berikut bukti kegiatan (laporan penelitian, artikel dalam jurnal ilmiah, buku dan lain-lain). Sedangkan untuk mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan, adalah:

1. Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (PS)
2. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan (PS)
3. Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa) (PS)
4. Kebijakan tertulis tentang penerimaan mahasiswa baru (Lembaga pengelola PS).⁷

⁷ wawancara

Usaha-usaha lain yang dilakukan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terhadap jurusan sehingga mencapai nilai akreditasi yang baik adalah melibatkan semua unsur terkait untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam proses akreditasi sehingga menguasai “isi dapur” lembaga (fakultas/universitas), pengelola perlu mengelola, memotivasi, dan membimbing tim (*task force*) dalam mempersiapkan akreditasi. Keterlibatan pemimpin (baik fisik maupun psikologis) akan memotivasi tim dalam bekerja.⁸

Pimpinan Fakultas setelah menerima surat pemberitahuan resmi dari BAN-PT tentang rencana kehadiran tim asesor, maka memberitahukan kepada ketua prodi untuk mempersiapkan sarana yang diperlukan seperti, dokumen pendukung dan ruang khusus yang dilengkapi dengan peralatan kantor (printer, kertas, proyektor LCD, dan wifi) di kampus untuk digunakan sebagai ruang kerja tim asesor termasuk ruangan untuk pertemuan dengan dosen, mahasiswa, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada saat tim asesor sampai dan akan mengadakan visitasi, maka tim asesor menemui pimpinan unit pengelola program studi, yang didampingi oleh pimpinan program studi dan tim penyusun borang akreditasi, untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan rangkaian kerja visitasi serta membacakan kode etik asesor. Dengan demikian jelas

⁸ wawancara

bahwa keberadaan ketua prodi sangat menentukan hasil vesitasi, sehingga dengan sendirinya sangat mempengaruhi hasil akreditasi.⁹

Hasil akreditasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry tahun 2014 mendapatkan nilai akreditasi “B” sama seperti tahun sebelumnya, namun meskipun demikian, dari segi dukungan baik finansial maupun dukungan stakeholder FTK semakin membaik. Tetapi karena bukan poin satu-satunya yang dinilai maka hal tersebut menjadi catatan bagi tim asesor. Sedangkan untuk akreditasi jurusan ini pada tahun 2014 lalu adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	C
2. Pendidikan Kimia	B
3. Pendidikan Biologi	B
4. Pendidikan Fisika	C
5. Pendidikan Matematika	B
6. Pendidikan Bahasa Inggris	A
7. Pendidikan Bahasa Arab	A
8. Pendidikan Agama Islam	A
9. Kependidikan Islam	B

Akreditasi merupakan hal yang sangat penting bagi institusi perguruan tinggi karena ia adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka

⁹ wawancara

akreditasi institusi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan atau pakar yang memahami hakekat pengelolaan perguruan tinggi melalui proses visitasi.

Dari data diatas terlihat bahwa masih ada prodi yang mendapat nilai akreditasi “C” Menurut Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, hal itu terjadi dikarenakan prodi ini merupakan salah satu prodi yang baru dan pertama kali dilakukan akreditasi. Seperti diketahui bahwa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan salah satu jurusan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, yang mulai menerima mahasiswa pada Tahun Akademik pada tahun 1999, keberadaan Jurusan ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/58/1999 tertanggal 25 Maret 1999 tentang penyelenggaraan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dekan, Pembantu Dekan, Kaprodi dan Dosen PGMI dapat dikemukakan bahwa, semangat dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pasca akreditasi menjadi terus meningkat. Setelah terakreditasi ada kegiatan pelatihan dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa perguruan tinggi mengalokasikan dana internal untuk memberi kesempatan kepada dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ada beberapa indikator yang menunjukkan kualitas input mahasiswa yang mendukung kinerja program studi yaitu

keketatan seleksi, masa studi dan IP kelulusan. Keketatan seleksi dihitung dari rasio jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dengan jumlah mahasiswa yang diterima, masa studi diperkirakan dari rasio jumlah input (mahasiswa yang masuk) dengan output (jumlah lulusan) 4 tahun kemudian. Berdasarkan data dokumentasi program studi, berikut ini dilaporkan perkembangan jumlah mahasiswa dan rasio seleksi mahasiswa program studi PGMI selama 5 tahun terakhir.

Data perkembangan jumlah mahasiswa PGMI dari 15 perguruan tinggi berdasarkan data yang ada terlihat bahwa jumlah pendaftar PGMI setiap tahun semakin naik. Rata-rata jumlah pendaftar PGMI untuk 15 perguruan tinggi tahun 2010 = **1805**, tahun 2011 = **3129**, tahun 2012 = **3482**, tahun 2013 = tahun **3753**, dan tahun 2014= **4129**.

Berdasarkan data yang ada terlihat keketatan seleksi untuk prodi PGMI mengalami peningkatan rasio keketatan seleksi yang awalnya sekitar 1:6 di tahun 2010, menjadi 1:14 di tahun 2011 dan tanpa mengalami penurunan peminat. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap prodi PGMI.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa urutan keketatan seleksi mahasiswa tertinggi terdapat pada FTIK (akreditasi B). Keketatan seleksi dengan rasio 1:56,8 ini terjadi karena meski animo calon mahasiswa PGMI banyak tetapi FTIK tidak menambah quota mahasiswa yang diterima.

Untuk mengetahui apakah status akreditasi mempengaruhi jumlah mahasiswa dan keketatan (rasio) seleksi, berikut dilaporkan tabulasi silang data rerata jumlah mahasiswa dan keketatan seleksi berdasarkan status akreditasi dan jenis dana yang pernah diterima prodi dari BAN-PT.

Prodi PGMI yang mendapat memiliki rerata jumlah mahasiswa yang lebih banyak dari pada mahasiswa fisika PGMI juga memiliki rerata jumlah mahasiswa yang lebih banyak dari rerata jumlah mahasiswa dari program studi yang terakreditasi C lainnya di fakultas lain yang ada di lingkungan UIN. *Dengan demikian, dan status akreditasi C tidak berpengaruh pada jumlah mahasiswa.*¹⁰

Efektivitas penyelenggaraan program studi dapat diukur dari ketepatan masa studi. Masa studi secara riil per individu dapat dihitung berdasarkan jumlah bulan menempuh studi. Dalam penelitian ini, ketepatan masa studi diperkirakan dari perbandingan jumlah mahasiswa yang masuk (*input*) pada tahun tertentu dengan jumlah mahasiswa yang lulus (*output*) empat tahun kemudian karena masa studi program S1 adalah 4 tahun. Mengingat program studi PGMI S1 baru dibuka mulai tahun 2008/2009 maka data lulusan yang digunakan untuk menghitung ketepatan masa studi adalah data lulusan tahun 2013 dan 2014. Berdasarkan data dokumen yang terkumpul,

¹⁰ wawancara

perbandingan jumlah input mahasiswa dan jumlah lulusan (output) dilaporkan pada Tabel sebagai berikut:

TABEL
PERKEMBANGAN JUMLAH INPUT DAN OUTPUT
MAHASISWA BARU PGMI

No	TAHUN		
		In	Out
1	2010	94	-
2	2011	243	-
3	2012	227	-
4	2013	522	165

Data tersebut menunjukkan tingkat kinerja program studi sudah maksimal, jika dilihat yaitu dari jumlah input sebesar 1066 dan jumlah lulusan empat tahun kemudian yaitu tahun 165 orang. Jumlah lulusan PGMI Universitas Islam Negeri Ar-raniry tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah input dari jurusan-jurusan lain yang ada dilingkungan FTIK. Jika rasio input mahasiswa menjadi indikator kualitas, maka input mahasiswa PGMI bukanlah mahasiswa yang unggul dalam persaingan karena rasio seleksi.

Performance program studi dapat diukur dari kualitas output yang tercermin dari IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Data IPK lulusan selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

TABEL
PERKEMBANGAN RERATA IPK PGMI
SELAMA 4 TAHUN TERAKHIR

No	TAHUN	Nilai Rata-rata
1	2010	3,07
2	2011	3,2
3	2012	3,3
4	2013	3,4

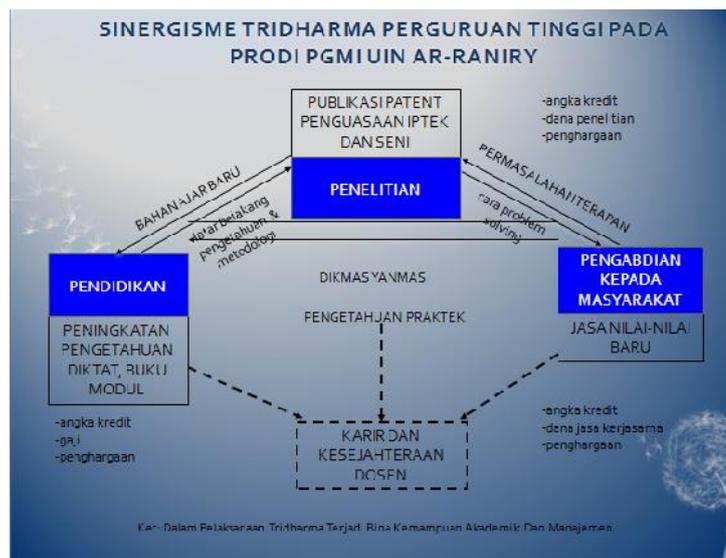
Data perkembangan rerata IPK lulusan menunjukkan prestasi yang cukup jelas pada mahasiswa program studi PGMI, IPK lulusan prodi PGMI meningkat. Pengendalian mutu lulusan tetap harus dijaga sehingga proses penilaian tetap memperhatikan standar yang objektif. Beberapa perguruan tinggi tidak mengisi data lulusan karena ada pergantian kepengurusan jurusan, sementara itu data evaluasi diri belum tersedia secara elektronik sehingga prodi mengalami kesulitan dalam pengisian data.

Berdasarkan Indeks Prestasi lulusan, terlihat bahwa rata-rata Indeks prestasi lulusan prodi PGMI selalu mengalami kenaikan. Kenaikan Indeks Prestasi lulusan untuk prodi PGMI meningkat perlahan yakni rata-rata 3,07 di tahun 2010, kemudian meningkat menjadi 3,2 di tahun 2011. Setiap tahun Indeks Prestasi lulusan meningkat sekitar 0,1. Sesuai dengan data tersebut maka kinerja prodi PGMI jika dilihat dari Indeks Prestasi lulusan senantiasa meningkat.

2. Perkembangan Jumlah Penelitian

Setiap dosen mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan kapasitas intelektual (keilmuan) sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2003 SISDIKNAS: Pasal 24 ayat 2: Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah setiap dosen berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebaruan dalam kebenaran ilmiah melalui metode ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan masalah.

Kinerja program studi ditunjukkan oleh produktivitas, kualitas dan efektivitas karya-karya inovatif yang dihasilkan oleh dosen. Karya inovatif yang *comparable* (dapat dibandingkan) dengan perguruan tinggi lain adalah karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Produktivitas ditunjukkan oleh kuantitas/jumlah penelitian sedangkan kualitas diukur dari jumlah dana yang terserap dengan asumsi semakin besar jumlah dana yang diraih maka semakin berkualitas penelitian yang dihasilkan.



Efektivitas dapat dilihat dari sumbangan atau pemanfaatan hasil penelitian tersebut oleh *stakeholder*/masyarakat. Dalam penelitian ini, untuk menilai kinerja program studi PGMI pada standar penelitian dan pengabdian masyarakat digunakan indikator kuantitas judul penelitian.

Data perkembangan jumlah penelitian pada prodi PGMI (2010-2013) dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**TABEL PERKEMBANGAN PENELITIAN
PRODI PGMI**

No	TAHUN	JUMLAH PENELITIAN
1	2010	1
2	2011	1
3	2012	2
4	2013	1

Data perkembangan jumlah penelitian kemudian dilihat dari status akreditasi perguruan tinggi. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas penelitian pada program sangat minim. Produktivitas karya penelitian sangat didukung oleh kemampuan dosen dan kebijakan pengalokasian dana penelitian. Mulai tahun 2010, DIKTI telah memberikan otonomi pengelolaan dana penelitian kepada perguruan tinggi. Kebijakan ini sangat mendukung dosen untuk lebih produktif karena dosen hanya bersaing dengan teman di perguruan tingginya sendiri. Selain kebijakan DIKTI, UIN memiliki sumberdana penelitian internal perguruan tinggi yang sangat mendukung produktivitas dosen melakukan penelitian.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry berpedoman pada Ketetapan Rektor tentang Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat, yang memuat aspek: Kebijakan dasar, Arah dan Fokus pengabdian kepada masyarakat (tingkat PT, Fakultas dan Jurusan/prodi). Sifat pengabdian kepada masyarakat, Bentuk kegiatan, Kedudukan organisasi, Sumber daya yang melibatkan dosen dan mahasiswa, dana dan fasilitas, Rencana dan Prosedur pengusulan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan. Sedangkan etika pengabdian kepada masyarakat, Tata cara pendanaan pengabdian kepada masyarakat, termasuk sumber dana, pengelolaan dana dan keberlanjutan pendanaan mengacu pada Ketetapan rektor

Nomor: 006/TAP/R-IAIN/2005 tentang Norma Pengabdian /Pelayanan Kepada Masyarakat.

Kontribusi Penelitian



Pengabdian melalui penelitian Ilmu yang dikuasai melalui proses pendidikan di perguruan tinggi semakin kuat untuk diimplementasikan dan diterapkan. Penelitian Dosen bukan hanya akan mengembangkan diri, namun juga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban dan kepentingan bangsa dalam menyejahterakan bangsa. Selain pengembangan diri secara ilmiah dan akademis. Selain itu dosen juga harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal softskill dan kedewasaan diri dalam menyelesaikan segala masalah yang ada. Dosen harus mengembangkan pola pikir yang kritis terhadap segala fenomena yang ada dan mengkajinya secara keilmuan. Berdasarkan data yang ada, maka

kelas prodi PGMI sangat minim hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen, sehingga dianggap masih kurang dan dianggap wajar jika mendapat nilai kurang.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh sekretaris Prodi Biologi yang menyatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Prodi berkenaan dengan proses akreditasi adalah terbatasnya jumlah dana yang tersedia bagi para dosen untuk melakukan penelitian.¹¹ Hal ini terlihat dari minimnya jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen.

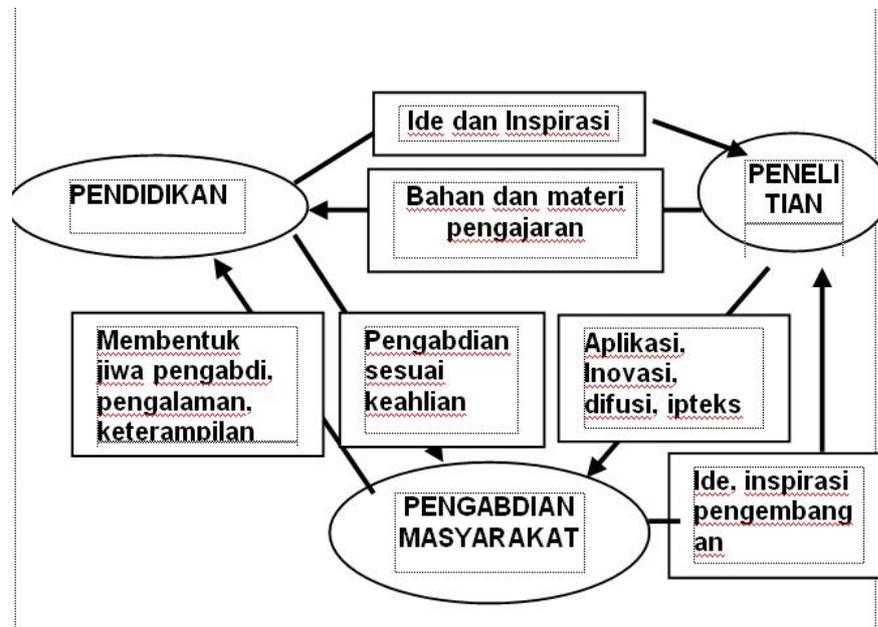
3. Perkembangan Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) merupakan kegiatan penting bagi suatu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kegiatan ini tercantum sebagai salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Implementasi dan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh dosen di bawah koordinasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat mesti dilaksanakan secara terintegrasi dan tidak terlepas dari unsur-unsur Tri Dharma lainnya, yaitu pendidikan dan penelitian.

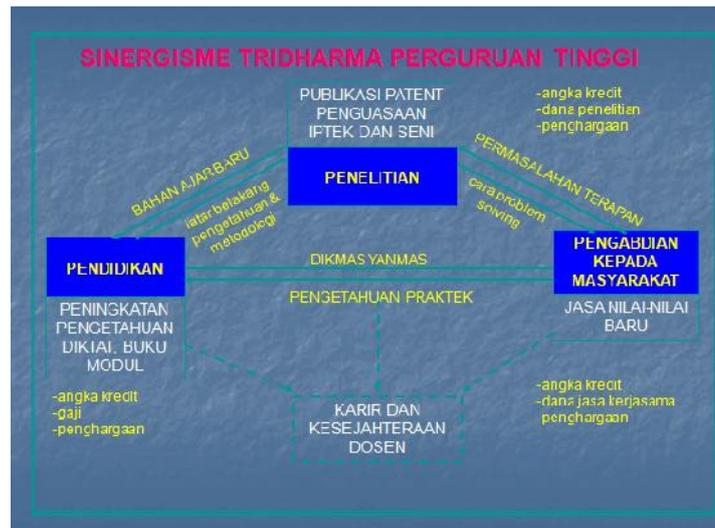
Melihat betapa pentingnya pengabdian masyarakat ini dan ianya merupakan bahagian yang integral antara satu dan lainnya, maka pada laporan penelitian ini juga akan

¹¹ Wawancara dengan Samsul Kamal, 12 Juni 2015.

digambarkan keterkaitan antara ketiga unsur tersebut yaitu keterkaitan yang harus terjadi dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, hal ini terlihat seperti apa yang digambarkan dalam skema dibawah ini.



Disamping itu mengingat fungsi perguruan tinggi sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan bangsa, maka pelaksanaannya kegiatan pengabdian masyarakat harus menganut asas kelembagaan, kerjasama, kesinambungan, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, mengidentifikasi perlunya perubahan paradigma dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi yang diantaranya adalah seperti yang tergambar dalam skema dibawah ini:



Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut dapat dilihat, bahwa pada setiap perguruan tinggi, baik prodi DIA-PGMI maupun NON DIA PGMI dari tahun 2007 sd 2011 sama-sama memiliki jumlah pengabdian yang cenderung naik. Namun bila dilihat dari rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat untuk DIA PGMI memiliki jumlah pengabdian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan prodi NON DIA-PGMI. Rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat prodi DIA-PGMI pada tahun 2007 = 9, tahun 2008 = 9, tahun 2009 = 12, tahun 2010 = 14, dan tahun 2011 = 16, sedangkan prodi NON DIA-PGMI pada tahun 2007 = 8 tahun 2008 = 11, tahun 2009 = 16, tahun 2010 = 17, dan tahun 2011 = 20, Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, kinerja DIA PGMI bila diukur dari jumlah pengabdian masyarakat terjadi peningkatan, tetapi tidak setinggi jumlah

pengabdian prodi NON DIA-PGMI.

Perkembangan jumlah pengabdian kepada masyarakat prodi PGMI dari tahun 2007 sd 2011 ditunjukkan pada Gambar 4.5 berikut. Dari gambar terlihat jumlah pengabdian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun tidak dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah tersebut sebagai akibat prodi telah terakreditasi, karena sebelum terakreditasi jumlah pengabdian masyarakat juga cenderung meningkat.

Data pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa PGMI yang berstatus akreditasi C memiliki rerata jumlah PPM lebih banyak daripada PGMI yang terakreditasi B. Hal ini mengindikasikan bahwa PGMI yang memiliki akreditasi C lebih mampu melakukan PPM daripada penelitian. Perbandingan rerata jumlah penelitian dan jumlah pengabdian masyarakat antara PGMI yang terakreditasi B dan C dapat disimak pada Tabel 4.8 berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dekan, Pembantu Dekan, Kaprodi dan Dosen PGMI dapat dikemukakan bahwa, semangat dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pasca akreditasi menjadi terus meningkat. Setelah terakreditasi ada kegiatan pelatihan dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa perguruan tinggi

mengalokasikan dana internal untuk memberi kesempatan kepada dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



B. Perolehan Nilai Hasil Akreditasi Program Studi di UIN Ar-Raniry

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry hingga saat ini telah memiliki sebanyak 45 program studi yang tersebar pada 9 fakultas. Sebagian di antaranya telah dilakukan akreditasi, yaitu sebanyak 29 program studi. Semua program studi yang sudah menjalani proses akreditasi bernaung di bawah 5 fakultas lama, kecuali Program Diploma III Perbankan Syariah. Program studi yang disebut terakhir ini awalnya bernaung di bawah Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu fakultas lama, kemudian dipindahkan ke fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seperti diketahui, sebelum beralih status menjadi universitas, institusi ini menyelenggarakan pendidikan dalam satu rumpun ilmu saja; yaitu ilmu agama Islam. Atas dasar itulah, selama 50 tahun sejak tahun 1963 sampai 2013, masih berstatus sebagai Institut Agama Islam. Artinya, semua program studi sebelumnya bernaung di bawah fakultas ilmu agama Islam. Jumlah program studi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan ilmu agama Islam sebanyak 29 program studi. Semuanya sudah menjalani proses akreditasi, bahkan ada program studi yang sudah beberapa kali diakreditasi. Sisanya, sebanyak 16 program studi yang bernaung di bawah 4 fakultas baru masih berusia satu tahun lebih dan saat ini sedang dalam proses pengajuan akreditasi.

Dari 29 program studi yang sudah menjalani proses akreditasi itu, hasilnya dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan. Sebagian besar di antaranya mendapat nilai B, yaitu 19 program studi, sisanya sebanyak 6 program studi mendapatkan nilai A, dan 4 program studi mendapatkan nilai C. Berikut ini tabel hasil akreditasi program studi yang ada di lingkungan UIN Ar-Raniry.

Fakultas	Program Studi	Nilai
Syariah dan Hukum	Hukum Keluarga	B
	Perbandingan Mazahab	B
	Hukum Pidana Islam	B
	Hukum Ekonomi Syariah	A
	Hukum Tata Negara	Dalam proses

	Ilmu Hukum	Dalam proses
Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	A
	Pendidikan Bahasa Arab	A
	Pendidikan Bahasa Inggris	A
	Pendidikan Matematika	B
	Manajemen Pendidikan Islam	B
	Pendidikan Fisika	B
	Pendidikan Biologi	B
	Pendidikan Kimia	B
	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	C
	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	Dalam proses
	Bimbingan Konseling	Dalam proses
	Pendidikan Teknik Elektro	Dalam proses
	Pendidikan Teknologi Informatika	Dalam proses
Dimaksud di	Ilmu Akidah	B
	Perbandingan Agama	C
	Ilmu al Quran dan Tafsir	B
	Filsafat Agama	Dalam proses
	Sosiologi Agama	Dalam proses
Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	B

	Bimbingan Konseling Islam (BKI)	B
	Manajemen Dakwah	B
	Pengembangan Masyarakat Islam	B
Adab dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	A
	Sejarah dan Kebudayaan Islam	B
	Ilmu Perpustakaan	C
	D3 Ilmu Perpustakaan	B
Ilmu Sosial dan Pemerintahan	Ilmu Politik	Dalam proses
	Ilmu Administrasi Negara	Dalam proses
Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	Dalam proses
	Perbankan Syariah	Dalam proses
	Ilmu Ekonomi	Dalam proses
	D3 Perbankan Syariah	A
Psikologi	Psikologi	Dalam proses
Sains dan Teknologi	Arsitektur	Dalam proses
	Biologi	Dalam proses
	Kimia	Dalam proses
	Teknik Lingkungan	Dalam proses
Pascasarjana	S3 Kependidikan Islam	C
	S3 Fiqh Modern	B

Perolehan nilai B bagi sebuah program studi tentu saja tidak menimbulkan masalah apa-apa. Artinya, program studi yang terakreditasi dengan nilai B dapat dikatakan menempati zona aman. Program studi dimaksud bisa melanjutkan seluruh rangkaian kegiatannya secara normal. Program studi yang mendapatkan nilai B tidak perlu mencemaskan akan ditutup akibat berkurangnya peminat. Program studi tersebut tidak merasa khawatir akan mendapatkan komplain dari para mahasiswa dan alumninya karena mereka tidak bakal menghadapi masalah dalam pemanfaatan ijazah yang diperoleh dari hasil studi pada program studi itu.

Hal ini berbeda jauh dengan program studi yang mendapatkan hasil penilaian akreditasi C. Program studi yang memperoleh nilai akreditasi C akan berhadapan dengan sejumlah masalah. Program studi tersebut berpeluang untuk ditutup akibat menurunnya minat calon mahasiswa melanjutkan studi ke program studi dimaksud. Calon mahasiswa enggan memilih melanjutkan studi ke program studi itu karena mengkhawatirkan ijazah yang akan diperoleh nantinya tidak dapat digunakan di dunia kerja, terutama jika memilih berkerja pada lembaga atau instansi pemerintah. Ini juga berarti, pengelola program studi yang memperoleh akreditasi C akan merasa sangat tidak nyaman. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun di antara pengelola program studi berkenan memperoleh nilai akreditasi C. Responden yang ditanya, semua menjawab bahwa mereka berusaha sekurang-

kurangnya mendapatkan nilai akreditasi B untuk program studi yang mereka kelola.

Pengelola program studi yang dijadikan sebagai responden memberikan jawaban yang sedikit bervariasi ketika ditanyakan mengenai keinginan mereka untuk dapat memperoleh nilai akreditasi A untuk program studi yang mereka kelola. Sebanyak 70 persen di antara responden menjawab bahwa mereka sangat menginginkan perolehan nilai akreditasi A. Sisanya, sebanyak 30 persen hanya mengatakan, yang penting tidak mendapat nilai akreditasi C. Mereka berpendapat bahwa untuk mendapatkan nilai akreditasi A itu bukan pekerjaan mudah. Banyak hal yang mesti disiapkan, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, suasana akademik, partisipasi dosen dan mahasiswa saat pengisian borang akreditasi, dan juga bahkan persoalan kebutuhan finansial yang cukup besar.

Salah satu hal yang menjadi perhatian sebagian responden adalah proses penyambutan dan pelayanan yang diberikan oleh pengelola program studi dan pimpinan fakultas kepada asesor yang melakukan visitasi ke program studi sedikit banyaknya juga berpengaruh, walaupun hal ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Terkait dengan penyambutan dan pelayanan terhadap asesor visitasi, tidak semua responden mempunyai kata sepakat. Sebagian responden meyakini bahwa penyambutan dan pelayanan asesor sama sekali tidak ada hubungannya dengan perolehan nilai akreditasi. Perolehan nilai akreditasi itu sifatnya sangat terkait dengan keadaan dan

kenyataan sebuah program studi dalam 7 (tujuh) standar yang mendapat penilaian asesor. Meskipun demikian, semua responden dari kalangan pimpinan fakultas menyetujui penyediaan dana sekedarnya untuk menjamu mereka. Jamuan di sini lebih dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan memuliakan tamu yang datang.

Informasi lainnya yang cukup menarik dalam kaitan ini adalah adanya pengakuan responden dari kalangan pengelola program studi bahwa ia dan mitra kerjanya di program studi itu sudah menyiapkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kepentingan menjamu asesor. Namun, karena asesor tidak melakukan visitasi ke program studi dimaksud, dana surplus tersebut dialihkan fungsi untuk berbagai keperluan lainnya pada program studi itu. Lebih lanjut ia mengakui, program studi yang dikelolanya sejauh ini memang tidak memiliki sumber penganggaran yang bersifat mandiri.¹² Semua kegiatan dan penganggaran dikendalikan oleh pihak pimpinan fakultas. Dengan adanya kelebihan dana yang disebutkan tadi, pengelola program studi merasa cukup beruntung.

Persediaan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk penyambutan asesor untuk ukuran kemampuan program studi tertentu agaknya cukup besar. Ketika ditanyakan kepada pengelola program studi lainnya yang menerima kedatangan asesor saat visitasi, juga mengakui bahwa untuk

¹²Wawancara dengan Maizuddin, tanggal 18 November 2015.

menjamu asesor yang melakukan visitasi memang membutuhkan biaya sekitar jumlah tersebut di atas.¹³ Meskipun demikian, responden ini menegaskan bahwa jumlah dana sebesar itu tidak hanya untuk melakukan pelayanan kepada asesor, tetapi juga sebagai biaya makan minum bersama antara pengelola program studi, pimpinan fakultas dan asesor. Artinya, ada saat tertentu yang digunakan untuk lebih menjalin silaturahmi sehingga diupayakan menyempatkan diri makan bersama sekurang-kurangnya satu kali bersama asesor.

Para responden dari kalangan pengelola program studi mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan hasil perolehan nilai akreditasi terhadap program studi yang mereka kelola. Sebanyak 80 (delapan puluh) persen mereka berpendapat bahwa nilai akreditasi yang diberikan untuk program studi yang mereka kelola sudah sesuai antara harapan dan kenyataan. Artinya, nilai yang diperoleh tersebut sudah sebanding dengan keadaan program studi dimaksud secara komprehensif. Sisanya, sebanyak 20 (dua puluh) persen mengaku bahwa nilai hasil akreditasi program studi itu tidak sepenuhnya real dan obyektif. Salah seorang pengelola program studi bahkan mengatakan bahwa keadaan yang sesungguhnya pada program studi yang dikelolanya tidak berbeda jauh dengan program studi lain yang ada di fakultas yang sama.¹⁴ Hanya saja, program studi

¹³Wawancara dengan Firdaus, tanggal 20 November 2015.

¹⁴Wawancara dengan Safilisyah, tanggal 19 November 2015.

yang lain bisa mendapat nilai B, sementara program studi yang dikelolanya hanya memperoleh nilai akreditasi C. Responden ini juga mengakui bahwa perolehan nilai C disebabkan oleh sejumlah faktor lainnya. Kedekatan secara personal antara asesor dengan pengelola program studi dan pimpinan fakultas ikut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil penilaian akreditasi.

Perbedaan pendapat di antara responden juga terlihat sangat tajam terkait dengan pandangan mereka mengenai sikap pimpinan dalam mengupayakan perolehan nilai akreditasi maksimum. Seorang responden dari kalangan pimpinan fakultas menyebutkan bahwa pimpinan memberikan perhatian sepenuhnya untuk kepentingan akreditasi program studi yang ada di lingkungan fakultasnya. Pimpinan memberikan dukungan yang maksimal baik dalam hal administrasi, pembiayaan, pendampingan dan konsultasi, serta penambahan tenaga jika diperlukan.¹⁵ Hal yang sama juga diakui oleh responden lainnya yang menyebutkan bahwa program studi adalah urat nadi sebuah fakultas, maka akreditasi program studi sudah sepatutnya didukung semaksimal mungkin.¹⁶

Responden lainnya menyatakan bahwa usaha untuk meningkatkan nilai akreditasi prodi juga ditentukan oleh keseriusan pimpinan dalam mengupayakan hal-hal yang

¹⁵Wawancara dengan Syarifuddin, tanggal 23 November 2015.

¹⁶Wawancara Juhari Hasan, tanggal 23 November 2015.

dianggap perlu dan menjadi penilaian pada saat visitasi dilakukan. Permasalahan rasio dosen dengan jumlah mahasiswa dan terbatasnya dana penelitian menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan hasil akreditasi prodi.¹⁷

Secara umum, persepsi responden berkenaan dengan standar penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi. Responden dari kalangan pengelola program studi mengakui bahwa pimpinan secara umum menyatakan dukungannya terhadap proses akreditasi program studi. Hanya saja, tidak jarang mereka mengakui merasa sangat kesulitan dalam melaksanakan tugas pengisian borang serta penyediaan lampirannya. Arsip persuratan yang dibutuhkan sebagai lampiran borang akreditasi yang berhubungan dengan program studinya sangat terbatas. Ia melakukan upaya “jemput bola” dengan cara menemui satu persatu dosen untuk meminta kelengkapan administrasi, karya ilmiah, *curriculum vitae* dan sebagainya.

Responden ini juga mengaku sangat kesulitan mendapatkan semua itu walaupun setiap dosen di program studi yang ia kelola sudah ditemui berkali-kali. Mereka sebagiannya menjanjikan akan membawanya ke kantor, namun setelah ditunggu untuk beberapa waktu, janji tersebut tidak terwujud. Responden ini juga mengeluhkan perhatian yang sangat minim

¹⁷ Wawancara dengan Samsul Kamal, 15 November 2015

dari pimpinan fakultas terkait dengan akreditasi program studi yang dikelolanya. Menurutnya, dekan tidak tahu apa-apa dan bahkan hampir tidak pernah menanyakan sudah sejauh mana proses pengisian borang akreditasi dilakukan. Sementara itu, wakil dekan bidang akademik sibuk dengan kegiatan personalnya di luar kampus sehingga pengerjaan proses akreditasi nyaris ia kerjakan sendiri.¹⁸ Pihak pimpinan fakultas baru terkejut setelah hasil akreditasi keluar dengan nilai C. Perolehan nilai C menurutnya mempunyai hikmah yang besar, karena memotivasi pimpinan untuk memberikan perhatian untuk proses serupa pada program studi lainnya.

¹⁸Wawancara dengan Firdaus, tanggal 20 November 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program studi yang sudah menjalani proses akreditasi di UIN Ar-Raniry sebanyak 29 program studi. Semua program studi tersebut bernaung di bawah 5 fakultas lama, kecuali Program Diploma III Perbankan Syariah. Program studi yang disebut terakhir ini awalnya bernaung di bawah Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu fakultas lama, kemudian dipindahkan ke fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dari 29 program studi yang sudah menjalani proses akreditasi itu, hasilnya dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan. Sebagian besar di antaranya mendapat nilai B, yaitu 19 program studi, sisanya sebanyak 6 program studi mendapatkan nilai A, dan 4 program studi mendapatkan nilai C.

Dari data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai hasil akreditasi dipengaruhi oleh faktor-faktor substansi dan sekaligus teknis. Faktor substansi mencakup kualifikasi sebuah program studi yang memenuhi standar yang diperlukan serta memiliki data pendukung atau dokumen yang lengkap. Akan halnya faktor teknis cukup beragam, mulai dari kejelian dalam mengisi borang akreditasi,

kerjasama team work dalam menyelesaikan pengisian borang, perhatian dan dukungan pimpinan, sampai kepada suasana program studi dimaksud ketika dilakukan visitasi oleh asesor BAN PT.

Kegagalan pencapaian nilai hasil akreditasi yang maksimum diakui lebih disebabkan oleh faktor-faktor teknis, seperti kurang lengkapnya data pendukung atau keliru dalam memahami perintah pengisian borang. Ketersediaan data pendukung selama ini tidak terpusat di program studi sehingga pada saat pengisian borang akreditasi, dirasakan kendala yang sangat berarti. Penyelenggara program studi dan bahkan sebagian unsur pimpinan fakultas tidak memahami dengan baik tatacara pengisian borang akreditasi.

Dukungan yang diberikan pimpinan di tingkat universitas terhadap pengelolaan program studi bisa disebut sudah maksimal. Ini terlihat dari dukungan sarana dan prasarana yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pimpinan universitas juga ikut ambil bagian pada saat proses visitasi terhadap prodi dilaksanakan oleh asesor BAN-PT.

B. Rekomendasi

Akreditasi program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry perlu segera dilakukan terhadap sejumlah program studi baru yang belum terakreditasi hingga saat ini. Program studi tersebut dalam waktu dekat akan menerbitkan ijazah untuk para

alumninya. Seandainya proses akreditasinya berjalan lambat, atau hasil akreditasinya bernilai rendah tentu akan sangat merugikan semua pihak.

Proses akreditasi program studi sedapat mungkin dijadikan sebagai tanggung jawab kolektif; mulai dari para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, penyelenggara program studi, dosen, karyawan, mahasiswa, alumni dan pihak user.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif HM, Guru Madrasah dan Tantangan Zaman, *Jurnal Penamas*, Badan Litbang dan Diklat Jakarta, Vol. XX No. 3, Tahun 2007, hal. 353.
- Ainal Mardhiah, *Kinerja Dosen Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, Tesis: Tidak dipublikasikan, Banda Aceh: PPs Unsyiah, 2011.
- Azyumardi Azra, Menuju PTAIN/PTAIS Unggul dan Kompetitif: Reinventing PTAI, disampaikan pada *Workshop Refresher* Program Peningkatan Kompetensi Dosen 2011, Jakarta 13 Oktober 2011.
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 38/kep/mk.waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 2-6.
- Lihat Marzuki Daud, *Pengembangan Profesional Dosen pada Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, Tesis: tidak dipublikasikan, Banda Aceh: PPs Unsyiah, 2008.
- Munirwan Umar, *Pengembangan Kompetensi Profesional Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh*, Tesis: tidak dipublikasikan, Banda Aceh: PPs Unsyiah, 2008.
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- P. Stephen Robbin, *Prilaku Organisasi*, edisi Bahasa Indonesia (Jakarta: Prehallindo, 1996) hal. 212;
- Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen Di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam (PTAI), hal. 17-18.

- Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) pasal 5 ayat 1;
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Singelton dan Straits, *Approaches to Social Research*. OUP: New York, 1999.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 125-127.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktek*, Edisi Revisi V, cet. 12. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suyudi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan; Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE, 1999.